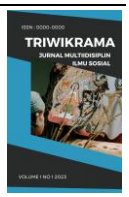
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 2 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM SMART CITY: APLIKASI TUMBAS DI KABUPATEN MOJOKERTO

Berlian Ayu Natasha, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Fitrotun Niswah
Program Studi S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available online Juni 2026

Email:
berlian.22205@mhs.unesa.ac.id,
galihpradana@unesa.ac.id,
muhammadfarid@unesa.ac.id,
fitrotunniswah@unesa.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis koordinasi perencanaan program Smart City melalui Aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan teori perencanaan prosedural Andreas Faludi sebagai kerangka analisis. Fokus kajian diarahkan pada kejelasan tujuan, hubungan tujuan dan sarana, proses organisasi dan koordinasi, rasionalitas pengambilan keputusan, serta evaluasi dan umpan balik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi rapat koordinasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program telah terarah pada integrasi Aplikasi Tumbas dengan agenda Smart City dan penguatan ekonomi digital UMKM, tetapi masih menghadapi kendala infrastruktur, literasi digital, dan kapasitas server. Koordinasi lintas-OPD sudah berjalan, namun masih terdapat fragmentasi kewenangan dan keterbatasan platform koordinasi terpadu. Evaluasi dan umpan balik belum sepenuhnya mampu menangkap pengalaman pengguna secara real-time. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola koordinasi lintas-OPD, peningkatan kapasitas teknis, dan sistem evaluasi pengguna yang lebih sistematis agar program lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: koordinasi perencanaan; Smart City; Aplikasi Tumbas; Kabupaten Mojokerto.

Abstract

This study analyzes the coordination of planning for the Smart City program through the Tumbas Application in Mojokerto Regency by using Andreas Faludi's procedural planning theory as the analytical framework. The study focuses on five main indicators: clarity of objectives, the relationship between goals and means, organizational processes and coordination, rationality of decision-making, as well as evaluation and feedback. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observation of coordination meetings, and documentation studies related to the planning and development of the Tumbas Application. The findings show that the objectives of the program are clearly directed toward integrating Tumbas with the Smart City agenda and strengthening the digital economy of MSMEs, but several obstacles remain in terms of infrastructure, digital literacy, and application server capacity. Inter-OPD coordination has been carried out, yet it still faces fragmented authority and limited integrated coordination platforms. Meanwhile, the evaluation and feedback mechanism has not fully captured user experience in real time. This study recommends strengthening cross-OPD coordination governance, improving technical capacity and digital literacy, and developing a more systematic user evaluation and feedback mechanism so that the Smart City program planning based on the Tumbas Application can become more effective, inclusive, and sustainable.

Keywords: Planning coordination; Smart City; Tumbas Application; Mojokerto Regency.

PENDAHULUAN

Transformasi digital mendorong pemerintah daerah mengembangkan Smart City sebagai strategi peningkatan layanan publik, efisiensi birokrasi, dan daya saing daerah. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, Aplikasi Tumbas menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung digitalisasi layanan dan penguatan ekonomi UMKM. Namun, keberhasilan program seperti ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh koordinasi antarlembaga, kejelasan tujuan, dan kesesuaian sarana dengan kebutuhan lapangan.

Penelitian ini penting karena Smart City bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Tanpa koordinasi yang baik, program rentan mengalami tumpang tindih kewenangan, keterlambatan implementasi, dan gangguan layanan. Karena itu, kajian ini menelaah bagaimana koordinasi perencanaan Aplikasi Tumbas disusun dan bagaimana proses tersebut mendukung agenda Smart City di Kabupaten Mojokerto.

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami proses perencanaan dan koordinasi secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi rapat koordinasi, dan studi dokumentasi terkait perencanaan dan pengembangan Aplikasi Tumbas. Analisis data menggunakan teori perencanaan prosedural Andreas Faludi, khususnya pada aspek kejelasan tujuan, hubungan tujuan dan sarana, proses organisasi dan koordinasi, rasionalitas pengambilan keputusan, serta evaluasi dan umpan balik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan program cukup kuat karena Aplikasi Tumbas dikaitkan langsung dengan agenda Smart City dan penguatan ekonomi digital UMKM. Program ini tidak sekadar diposisikan sebagai aplikasi layanan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses pasar, meningkatkan transaksi digital, dan mendukung modernisasi pelayanan publik. Akan tetapi, pencapaian tujuan tersebut masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur digital, literasi pengguna, dan kapasitas teknis sistem.

Hubungan antara tujuan dan sarana juga terlihat dari upaya pemerintah daerah memilih aplikasi digital, dukungan sosialisasi, dan pengembangan fitur layanan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan. Pilihan sarana tersebut sudah relevan, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan sumber daya yang memadai, terutama dalam hal server, pendampingan pengguna, dan integrasi antarsistem. Ini menunjukkan bahwa hubungan tujuan-sarana sudah logis, tetapi masih perlu diperkuat agar implementasi lebih stabil dan responsif.

Pada aspek organisasi dan koordinasi, Disperindag, Diskominfo, dan pihak terkait lainnya telah terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan aplikasi. Pembagian peran terlihat melalui rapat teknis, audit sistem, dan evaluasi kendala layanan. Namun, koordinasi lintas-OPD masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kewenangan serta belum adanya platform koordinasi terpadu yang sepenuhnya efektif. Kondisi ini membuat proses komunikasi dan penyelesaian masalah belum selalu berjalan cepat.

Rasionalitas pengambilan keputusan dalam perencanaan juga tampak dari penggunaan rapat kerja, pertimbangan teknis, dan masukan dari pihak terkait sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh pimpinan dinas. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil secara spontan, melainkan melalui proses analisis dan diskusi bersama. Meski demikian, ruang partisipasi pengguna dan umpan balik yang lebih luas masih perlu diperkuat agar keputusan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Evaluasi dan umpan balik menjadi aspek penting dalam menjamin keberlanjutan program. Skripsi menunjukkan bahwa Aplikasi Tumbas telah mengalami pengembangan dari basis website ke mobile, dan terus disempurnakan melalui penambahan fitur serta penyesuaian kebutuhan pengguna. Meski demikian, mekanisme evaluasi belum sepenuhnya mampu menangkap pengalaman pengguna secara real-time, sehingga perbaikan berkelanjutan masih perlu dirancang secara lebih sistematis.

KESIMPULAN

Koordinasi perencanaan Aplikasi Tumbas di Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan arah tujuan yang jelas dan relevan dengan agenda Smart City, tetapi masih menghadapi tantangan pada infrastruktur, koordinasi lintas-OPD, dan evaluasi program. Agar program lebih efektif, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas teknis, serta sistem evaluasi dan umpan balik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

REFERENSI

Aisyah, S., Hidayah, Z., Juniadi, D., Purnomo, E. P., Wibowo, A. M., & Harta, R. (2024). Transforming Smart City Governance for Quality of Life and Sustainable Development in Semarang City, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, *19*(9).

Anthopoulos, L. G. (2017). The rise of the smart city. In *Understanding smart cities: A tool for smart government or an industrial trick?* (pp. 5–45). Springer.

Ardelia, L., & Pradana, G. W. (2022). Inovasi Pelayanan E-SIAP (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *Publika*, 309–322.

Ardhitha, R. (2024). Teknologi Pintar dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan. *JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, *3*(2), 207–216.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta..(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta*.

Bae, B., & Choi, S. (2024). The effect of collaborative governance in social startups on social performance: The mediating effect of economic performance. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *10*(3), 100370.

Faculty, T. M. I. T., & Friedmann, J. (2018). *MIT Open Access Articles A Planners ' Planner : John Friedmann ' s Quest for a General Theory of Planning*. *2*(April), 179–191. https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1427616

Fahrina, A. (2022). Analisis kesiapan pembangunan smart city daerah studi kasus: Kabupaten Temanggung. *JATISI*, *9*(2), 984–995.

Febriyanti, A., Kanti, Y. S., & Pratama, S. G. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Terintegrasi Dalam Satu Lokasi: Studi Kasus Mal Pelayanan Publik (Mpp) Surabaya. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, *6*(2), 168-180.

Firman, F., & Rahmawati, R. (2023). Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance. *The Indonesian Journal Of Public Administration (Ijpa)*, *9*(1).

Gerli, P., Mora, L., Neves Da Rocha, F., & Nguyen, H. (2024). *World Smart Cities Outlook 2024*.